



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54, Padang 25137 Telp. (0751) 40818 Fax.(0751) 40811, 40817

---

Nomor : 56/T/S-HP/DJPK-V.PDG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya  
Tahun 2025

Padang, 25 Mei 2026  
**Kepada Yth.**  
**Ketua DPRD Kabupaten**  
**Dharmasraya**  
di  
Pulau Punjung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Data Subjek dan Objek Pajak serta Retribusi Belum Mutakhir Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan PBB P2, Pajak Air Tanah dan Retribusi Pemakaian Air Rusunuwa;
- b. Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp292.188.541,05; dan
- c. Pengelolaan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Tertib Mengakibatkan Persediaan Pancang Perpotensi Rusak dan Mengalami Penurunan Kualitas serta Persediaan Aspal Berpotensi Disalahgunakan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Dharmasraya antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BKD untuk menginstruksikan para Kabid Pendapatan supaya:
  - 1) Melakukan penilaian PBB-P2 atas lima perusahaan PKS dan tujuh SPBU;
  - 2) Melakukan penilaian ulang PBB atas lahan yang sudah dialihgunakan;
  - 3) Melakukan pendataan dan penilaian Pajak Air Tanah pada sepuluh objek pajak SPBU;

- b. Kepala Dinas PUPR untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal di satuan kerjanya serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp292.188.541,25 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;
- c. Kepala Dinas PUPR untuk:
- 1) Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan persediaan di satuan kerjanya;
  - 2) Memproses pengembalian atas aspal kadar 60/70 yang dipinjam sebanyak 43 drum dengan berat 6,62 ton dan atas aspal kadar 60/70 yang hilang sebanyak tujuh drum dengan berat 1,08 ton aspal sesuai ketentuan; dan
  - 3) Menginstruksikan Pengurus Barang supaya lebih optimal dalam melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pengamanan persediaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 28.A/T/LHP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan 28.B/T/LHP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala BPK Perwakilan, *M*  
*Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFA*  
Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI; dan
5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya.